

## ***Community Participation in Compilation of Village Mid-Term Development Plans (RPJMDES) in Keper Village Krembung District by 2021-2027***

### **[Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Keper Kecamatan Krembung Tahun 2021-2027]**

Syari Nur Zahro<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [lailulmursyidah@umsida.ac.id](mailto:lailulmursyidah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze and describe Community Participation In Compilation Of The Village Mid-Term Development Plan (RPJMDES) In Keper Village, Krembung District by 2021-2027. The method used in this research is descriptive qualitative. The selection of informants was carried out by purposive sampling. The results show that firstly, participation in planning and decision-making is still low, with the dominance of certain community leaders and the lack of involvement of women who actively voice ideas. Secondly, at the implementation stage, community involvement is quite high, especially in the physical development of the village, although attention to non-physical development is still limited. Third, participation in the utilization of results is optimal, where the community can enjoy better infrastructure facilities. Fourth, at the evaluation stage, although monitoring activities are effective, budget limitations and lack of timely support are obstacles that need to be overcome to support more sustainable village development.*

**Keywords -** *Community Participation; Preparation; RPJMDES*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di Desa Keper Kecamatan Krembung Tahun 2021-2027. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pada tahap partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah, dengan dominasi tokoh masyarakat tertentu serta minimnya keterlibatan perempuan yang aktif menyuarakan gagasan. Kedua, pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat cukup tinggi, terutama dalam pembangunan fisik desa meski perhatian terhadap pembangunan non-fisik masih terbatas. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil sudah optimal, di mana masyarakat dapat menikmati fasilitas infrastruktur yang lebih baik. Keempat, pada tahap evaluasi, meski kegiatan monitoring berjalan efektif, keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan yang tepat waktu menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.*

**Kata Kunci -** *Partisipasi Masyarakat; Penyusunan; RPJMDES*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan Indonesia di era globalisasi ini bersifat desentralisasi, di mana pemerintah pusat melimpahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya [1], seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan dan kepentingan pemerintahan daerahnya [2].

Fokus utama dalam pembangunan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pembangunan desa yang berimplikasi pada implementasi pembangunan desa mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang disusun dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sebagai pedoman dalam pembangunan secara keseluruhan dan dilakukan bertahap untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan [3].

Pelaksanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua proses penyusunan dokumen. Pertama, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berjangka selama lima tahun, harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat desa sehingga dapat mendeteksi potensi masalah dan menentukan tindakan yang tepat. Kedua, dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang berjangka waktu satu tahun [4]. Kedua dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 [2].

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Keper dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa berlangsung sejak tahun 2021. Dokumen RPJMDes memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Desa Keper Nomor 7 Tahun 2021, agar program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat [5].

Prioritas masalah yang disusun dalam RPJM-Desa Keper tahun 2021-2027 diberbagai bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, partisipasi masyarakat harus diikutsertakan dan dilibatkan didalamnya yang dapat mendorong munculnya keterlibatan emosional terhadap program-program yang akan direncanakan [6].

Partisipasi masyarakat terhadap program yang direncanakan akan diberikan kesepakatan bersama melalui diselenggarakannya Musrenbang sesuai tahun anggaran oleh Pemerintah Desa Keper untuk membangun kepentingan dan kemajuan desa dengan melihat potensi dan sumber pembangunan yang tersedia [7]. Di bawah ini adalah tabel rekapitulasi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Keper :

**Tabel 1.** Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di Desa Keper Tahun 2021-2024

| No. | Tahun | Hadir    | Tidak Hadir | Presentase |
|-----|-------|----------|-------------|------------|
| 1   | 2021  | 48 orang | 22 orang    | 68%        |
| 2   | 2022  | 45 orang | 25 orang    | 64,2%      |
| 3   | 2023  | 45 orang | 25 orang    | 64,2%      |
| 4   | 2024  | 43 orang | 27 orang    | 61,4%      |

*Sumber : Data Olah Peneliti, 2024*

Berdasarkan pada tabel 1, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Pemerintah Desa Keper dapat disimpulkan mengalami penurunan bahwa setiap tahun terdapat perubahan jumlah tingkat partisipasi masyarakat di Desa Keper. Adapun penelitian terdahulu sebagai referensi untuk meninjau penelitian saat ini mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pertama, penelitian tersebut dilakukan oleh Amiruddin, Usuluddin, dan Ansari (2020) [5], yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Di Kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah." Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut teori Sugiyono (2005:46), Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes sudah cukup baik, banyak masyarakat yang berpartisipasi, dan bentuk-bentuk partisipasi yang ada berupa faktor kepribadian, persepsi, dan motivasi [8].

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2024), yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo." Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal pada indikator partisipasi dalam tahap perencanaan masih rendah. Namun, keterlibatan pada tahap pelaksanaan cukup tinggi, baik untuk pembangunan fisik maupun non-fisik serta indikator partisipasi dalam tahapan pemanfaatan juga sudah cukup optimal [2].

Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Suarjaya (2021), yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangeh Kecamatan Abianseml Kabupaten Badung." Menggunakan Teori Partisipasi Masyarakat dari Holil (1980:8), yang mengidentifikasi lima indeks partisipasi masyarakat: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lama tinggal [9]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dari tokoh panutan masyarakat, kapabilitas organisasi masyarakat yang memadai, dan sumber daya manusia yang sesuai. Namun, kurangnya pemahaman tentang informasi program, kurangnya keterlibatan pemerintah dengan masyarakat, serta pelaksanaan program yang belum tuntas [10].

Hasil observasi di lapangan terdapat beberapa masalah terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Keper Kecamatan Krembung. Pertama, yaitu rendahnya tingkat kehadiran masyarakat desa dalam Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dari 70 total undangan yang telah disebar dan bagikan, fakta di lapangan yang menghadiri rapat penyusunan RPJMDes di tahun 2024 sebanyak 43 orang, sehingga beberapa usulan terkait kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya tersampaikan karena tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Keper.

Kedua, kurangnya keterlibatan aktif seluruh masyarakat desa dalam pengajuan gagasan pembangunan di tingkat dusun hanya beberapa masyarakat tertentu yang aktif dalam pengajuan daftar usulan kegiatan atau pembangunan. Contohnya, hasil aspirasi masyarakat tertentu saja sehingga sebagian besar usulan pembangunan yang dibahas dan dirumuskan belum tentu mewakili semua unsur masyarakat di desa.

Terakhir, kurangnya keterlibatan tokoh perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa seperti kelompok wanita hanya diwakilkan oleh kelompok PKK atau hanya satu kader dari masing-masing dusun masih belum bisa terlibat

secara terbuka, sehingga seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa harus sesuai dengan kebijakan RPJMDes, walaupun beberapa program belum terpenuhi karena kurangnya sumber daya manusia yang disebabkan banyak masyarakat yang masih awam terkait pedoman dan kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta perlu menekankan peran perempuan sebagai aktivis desa dibangun sehingga perlu diadakannya pemberdayaan masyarakat yang sistematis dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat demi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan [11].

Dari observasi di lapangan peneliti memilih teori partisipasi masyarakat yang dirumuskan oleh Kaho (2003) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian integral dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan [12].

Menurut Kaho (2003), terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes yaitu (1) Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, meliputi penyumbangan ide atau pemikiran, menghadiri pertemuan, diskusi, dan menanggapi program yang ditawarkan. (2) Partisipasi dalam pelaksanaan, meliputi pendanaan, operasional administrasi, koordinasi, dan perumusan program merupakan kelanjutan dari rencana yang disusun sebelumnya. (3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan. Dan (4) Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya [13].

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih tempat penelitian di Desa Keber Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam Penyusunan RPJM-Des di Desa Keber Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2021-2027 Di Desa Keber Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”.

## II. METODE

Dalam penelitian terkait “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Keber Kecamatan Krembung” merupakan jenis penelitian kualitatif. Penulis ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat desa dalam Penyusunan RPJM-Des di Desa Keber Kecamatan Krembung. Penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen terkait RPJM-Des.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian terdiri dari 4 orang, yaitu Sekretaris Desa (satu orang), Kaur Perencanaan (satu orang), Kaur Keuangan (satu orang), dan Masyarakat (satu orang). Fokus utama penelitian adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan RPJM-Des dengan merujuk pada empat indikator partisipasi yaitu tahap partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, tahap partisipasi dalam pelaksanaan, tahap partisipasi dalam memanfaatkan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan interaktif Miles & Huberman yang mencakup yaitu pertama, pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan perekaman foto. Kedua, reduksi data yang melibatkan penyaringan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian data yang diperoleh agar lebih mudah dikelola. Ketiga, penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Keempat, penarikan kesimpulan yaitu proses yang menghasilkan data yang sesuai dengan rumusan masalah [8].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Kaho (2003) yang menyebutkan beberapa indikator yang mempengaruhi partisipasi masyarakat suatu program yaitu partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi (Josef Riwu Kaho 2003).

### Partisipasi dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Menurut Kaho (2003), perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan indikator dalam menentukan efektivitas pelibatan masyarakat seperti menyumbangkan ide atau pemikiran, menghadiri pertemuan, dan menanggapi program yang diberikan atau diusulkan [13].

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan masyarakat selalu dilibatkan dalam diskusi, musyawarah, atau pertemuan desa pembangunan akan berhasil jika masyarakat berpartisipasi penuh dan mendukungnya, sehingga pemerintah desa dapat membuat kebijakan yang memaksimalkan peluang bagi masyarakat [14]. Masyarakat Desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara lisan

maupun tertulis sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes), meskipun tidak semua orang mengetahui secara pasti isi regulasi tersebut [15].

Informan utama peneliti selaku Sekretaris Desa sekaligus Ketua tim penyusun RPJMDes di Pemerintah Desa Keper menjelaskan urutan kegiatan dalam penyusunan RPJMDes, yang pertama berupa penyebaran undangan kepada lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat untuk pembentukan tim penyusun RPJMDes.

Tim penyusunan RPJMDes mengadakan pertemuan jaring aspirasi di tingkat RT dengan membuat daftar usulan rencana kegiatan berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di masing-masing wilayah, kemudian mengadakan beberapa kali musyawarah desa dengan topik-topik seperti pembentukan tim penyusun, pertanyaan dan tanggapan terkait RPJMDes [16].

**Tabel 2.** Struktur Tim Penyusunan RPJM-Desa di Pemerintah Desa Keper

| No. | Nama               | Jabatan    | Unsur            |
|-----|--------------------|------------|------------------|
| 1.  | Suharto, S.E       | Pembina    | Kepala Desa      |
| 2.  | Ardi Perdana Sukma | Ketua      | Sekretaris Desa  |
| 3.  | Puji Suntoro       | Sekretaris | LPMD             |
| 4.  | Ridoi              | Anggota    | Perangkat Desa   |
| 5.  | Sutrisno           | Anggota    | Perangkat Desa   |
| 6.  | Sukandar           | Anggota    | Perangkat Desa   |
| 7.  | Suyadi             | Anggota    | Perangkat Desa   |
| 8.  | H. Mat Saeku       | Anggota    | LPMD             |
| 9.  | H. Sujak           | Anggota    | LPMD             |
| 10. | Senain             | Anggota    | RT/RW            |
| 11. | Heri Dwi S.        | Anggota    | RT/RW            |
| 12. | H. Suyanto         | Anggota    | Tokoh Agama      |
| 13. | Slamet Mashuri     | Anggota    | Tokoh Masyarakat |
| 14. | Toni Ardiyanto     | Anggota    | Tokoh Pemuda     |
| 15. | Miftakhur Ridho    | Anggota    | Tokoh Pemuda     |

*Sumber : Dokumen Desa Keper, 2024*

RPJMDes disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, proses penyusunan dimulai dari musyawarah di tingkat dusun difasilitasi oleh tim penyusun RPJMDes untuk perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta menjadi pedoman bagi Pemdes Keper dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah desa agar lebih terarah dan pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah Desa Keper kembali mengadakan rapat jaring aspirasi masyarakat untuk menerima masukan, kritik, dan saran, serta memberikan kesempatan kepada seluruh perwakilan masyarakat untuk menyampaikan usulan dan pendapat agar dapat dipertimbangkan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta bermanfaat bagi warga Desa Keper [17].



**Gambar 1.** Pelaksanaan Rapat Jaring Aspirasi atau Pengumpulan Usulan Masyarakat

*Sumber : Arsip Dokumen Desa Keper, 2021*

Gambar diatas merupakan kegiatan pelaksanaan rapat jaring aspirasi atau pengumpulan usulan dari masyarakat yang bertujuan agar usulan-usulan dan pendapat dari masyarakat dapat tertampung. Sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Keper Kecamatan Krembung.

Tingkat kehadiran dalam pelaksanaan rapat jaring aspirasi masih rendah, terdapat beberapa kali diadakan rapat RPJMDes dan RKP Desa hanya beberapa orang yang menghadiri. Khususnya, Penyampaian gagasan dalam musyawarah pembangunan desa mengikutsertakan tokoh wanita yang tergabung dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terkadang tidak menghadiri rapat. Maka dari itu Pemerintah Desa Keper perlu berupaya memberikan peningkatan proporsi untuk tokoh wanita dalam penyampaian usulan program. Penyetaraan

gender ini sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya kesenjangan sosial dalam masyarakat dalam penyampaian pendapat untuk penyusunan RPJM Desa. Serta, dalam pengajuan ide pembangunan di tingkat dusun hanya beberapa masyarakat tertentu yang aktif dalam pengajuan daftar usulan kegiatan atau pembangunan.

Setelah usulan dari masyarakat tertampung, tim penyusun RPJMDes menyusun skala prioritas masalah yang bertujuan untuk menentukan program yang paling penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian, Pemerintah Desa Keper kembali melakukan rapat pengesahan dokumen RPJMDes yang merupakan bentuk telah terselesaikannya penyusunan dokumen RPJMDes.

Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen RKP Desa dan membentuk sebuah tim penyusun dokumen RKP Desa terlebih dahulu seperti pada pembentukan tim penyusun dokumen RPJMDes. Berikut merupakan struktur tim penyusun dokumen RKP Desa yang dipilih dari berbagai perwakilan masyarakat Desa Keper :

**Tabel 3.** Struktur Tim Penyusun Dokumen RKP Desa Keper

| No. | Nama               | Jabatan    | Perwakilan dari Unsur |
|-----|--------------------|------------|-----------------------|
| 1   | Ardi Perdana Sukma | Ketua      | Sekretaris Desa       |
| 2   | Puji Suntoro       | Sekretaris | LPMD                  |
| 3   | Sutrisno           | Anggota    | Perangkat Desa        |
| 4   | Senain             | Anggota    | RT                    |
| 5   | Heri Dwi S.        | Anggota    | RW                    |
| 6   | Toni Ardiyanto     | Anggota    | Karang Taruna         |

*Sumber : Dokumen Desa Keper Tahun 2021-2027, 2024*

Tugas-tugas tim penyusunan RKP Desa adalah pemahaman dan penyesuaian rancangan program kerja desa yang sesuai dengan prioritas pembangunan terhadap anggaran dengan kemampuan keuangan desa, serta pencermatan ulang terhadap dokumen RPJMDes untuk membentuk rencana kegiatan dan anggaran kegiatan. Setelah tim penyusun RKP Desa segera menyusun pengutamakan program dan pembangunan desa yang merupakan program prioritas pembangunan desa dianggap sebagai kebutuhan utama masyarakat desa yang apabila tidak didahulukan akan menimbulkan masalah-masalah baru yang cukup kompleks.

**Tabel 4.** Rencana prioritas program pembangunan Desa Keper tahun 2024 akan direalisasikan pada tahun 2025

| No | Prioritas program pembangunan dalam bidang | Kegiatan program pembangunan   |
|----|--|--|
| 1  | Bidang penyelenggaraan pemerintah desa     | a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)<br>b. Pelatihan kepada perangkat Pemerintah Desa Keper<br>c. Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan di Kantor Pemerintah Desa Keper<br>d. Pembaharuan profile desa di situs website Pemerintah Desa Keper<br>e. Pembaharuan data kependudukan di Desa Keper |
| 2  | Bidang pelaksanaan pembangunan desa        | a. Pembangunan atau peningkatan jalan<br>b. Pembuatan selokan baru di RT 02<br>c. Pembuatan gapura pembatas desa<br>d. Peninggihan pondasi apor<br>e. Pembuatan jamban/WC (per rumah)<br>f. Pembangunan pasar desa   |
| 3  | Bidang pembinaan Masyarakat desa           | a. Pelatihan kepada peningkatan kinerja Linmas<br>b. Pembinaan anti narkoba sasaran pemuda dan orang tua   |

|   |                                     |    |  |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 4 | Bidang pemberdayaan Masyarakat desa | a. | Pelatihan home industri atau pematapan usaha kecil |
|   |                                     | b. | Pelatihan budidaya tanaman organik                 |
|   |                                     | c. | Pelatihan lokomotif pembangunan ekonomi lokal      |

*Sumber : Data Olah Peneliti, 2024*

Tabel di atas merupakan prioritas program pembangunan Desa Keber tahun 2024 dalam berbagai bidang, mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari 5 (lima) program pembangunan, bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari 6 (enam) program pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang terdiri dari 2 (dua) program pembangunan, serta bidang pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) program pembangunan.

Disusunnya program prioritas pembangunan desa dalam RKP Desa untuk terwujudnya rencana program pembangunan desa yang baik dan tepat sesuai sasaran sehingga pemanfaatan potensi desa dapat terealisasi secara maksimal yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMDes. Selanjutnya mengadakan rapat pengesahan dokumen RKP Desa telah disusun dan telah disepakati bersama.

Indikator partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sejalan dengan studi sebelumnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” oleh Halimatus Sa’diyah dan Ilmi Usrotin Choiriyah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan dan pengajuan gagasan program pembangunan desa melalui pertemuan musyawarah desa belum maksimal. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana jangka menengah desa untuk program pembangunan desa yang disepakati.

Dari fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat menurut Kaho (2003) bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan sudah maksimal, namun pada tahap pengambilan keputusan belum maksimal. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ditentukan dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang memadai.

### Partisipasi dalam Pelaksanaan

Menurut Kaho (2003), partisipasi dalam pelaksanaan meliputi dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program merupakan tahapan kelanjutan rencana. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk tenaga berupa gotong-royong, kerjabakti, jadi tukang dan lainnya, maupun barang berupa makanan, batu, bamboo, serta bentuk informasi (media sosial) [13].

Sebagian masyarakat Desa Keber sudah inisiatif khususnya dalam hal kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan merupakan faktor untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga cukup penting untuk dilaksanakan program pembangunan desa di Desa Keber pada tahun 2024.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari informan peneliti selaku Kaur Perencanaan menjelaskan program pembangunan desa di Desa Keber terdiri dari dua jenis pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik yang dimana partisipasi masyarakat banyak yang terlibat atau memiliki kesadaran diri sudah sangat baik. Namun, kebanyakan masyarakat desa mengusulkan pembangunan desa berupa fisik. Sedangkan masyarakat desa tidak pernah mengajukan usulan untuk pembangunan desa berupa non fisik.

**Tabel 5.** Program Pembangunan Desa Keber Tahun 2024

| No. | Jenis Pembangunan                        | Program Pembangunan Desa | Tahun   |
|-----|--|--------------------------|---|
| 1   | Pembangunan Fisik Desa di Desa Keber     | a.                       | Peninggihan Jalan dan Pemasangan Paving di RT 03 RW 02      |
|     |  | b.                       | Pembangunan Gedung Serbaguna                                |
|     |  | c.                       | Pembuatan Saluran Irigasi                                   |
| 2   | Pembangunan Desa Non Fisik di Desa Keber | a.                       | Sosialisasi khusus pemberdayaan masyarakat perempuan        |
|     |  | b.                       | Sosialisasi atau pelatihan Kurma terkait dengan bidang UMKM |

*Sumber : Data Olah Peneliti, 2024*

Tabel diatas merupakan Pembangunan yang telah terlaksana pada tahun 2024, yang mana pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang cukup kompleks. Pembangunan Fisik seperti peninggihan jalan dan pemasangan jalan pavingisasi pada RT 03 RW 02, pembangunan gedung serbaguna di sebelah Kantor Pemerintah Desa Keper, dan peningkatan saluran irigasi pertanian di sawah blok belakang SDN Keper. Sedangkan Pembangunan non fisik seperti sosialisasi khusus pemberdayaan masyarakat perempuan dan sosialisasi atau pelatihan Kurma terkait dengan bidang UMKM.

Pembangunan fisik merupakan program prioritas pembangunan desa yang dapat di lihat mata seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan bangunan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa dapat mempercepat transformasi ekonomi dan sosial terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pada pembangunan fisik maupun non fisik sudah maksimal, yang dimana sistem pengerjaannya dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya agar pembangunan yang dilaksanakan akan terselesaikan dengan cepat. Pembangunan fisik desa lebih diprioritaskan karena hasilnya dapat terlihat secara langsung oleh mata dibandingkan dengan program pembangunan desa non fisik.

**Gambar 2.** Pembangunan Jalan Paving, Gedung Serbaguna, Pembuatan Saluran Irigasi



Sumber : Data Olah Peneliti, 2024

Gambar 2 menunjukkan proses pelaksanaan program pembangunan fisik desa berupa pembangunan infrastruktur di Desa Keper yang dilakukan oleh tenaga pekerja atau buruh bangunan, hal ini bertujuan untuk memenuhi kualitas kebutuhan dasar masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Pembangunan non fisik adalah proses pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar mampu menghadapi tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembangunan desa non fisik terbentuk dari usulan masyarakat sendiri dan berbentuk sebuah program pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat desa yang dimana hasilnya tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata, karena proses pembentukan pada sumber daya manusianya secara bertahap sampai 3 tahun kedepannya akan dapat menuaikan hasilnya. Pembangunan desa ini merujuk pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat desa serta berdaya secara ekonomi maupun sosial.

Pemerintah Desa Keper menyelenggarakan program pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat desa melalui kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga eksternal yang ahli sesuai dengan jenis program yang akan diselenggarakan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dan efektif bagi masyarakat desa setempat.

Namun, Pemerintah desa Keper masih belum terealisasi karena pemerintah desa lebih memprioritaskan pada pembangunan desa fisik seperti pembangunan infrastruktur, serta anggaran dana desa yang terbatas disebabkan oleh dana desa yang dialokasikan lebih banyak untuk proyek fisik sehingga program pembangunan desa non fisik menjadi tertunda.

Pernyataan yang didapatkan dari informan selaku Kaur Keuangan di Desa Keper menunjukkan penentuan dana desa prioritas untuk melaksanakan pembangunan desa, Pemerintah Desa Keper menetapkan alokasi anggaran dana desa untuk pembangunan desa yaitu maksimal sebesar 408.497.828 yang sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Berikut di bawah ini merupakan tabel yang berisi rincian anggaran dana desa di Pemerintah Desa Keper.

**Tabel 6.** Anggaran Dana Desa di Pemerintah Desa Keper Tahun 2024

| No. | Sumber dana          | Anggaran (Rp)   | Uraian  |
|-----|----------------------|---|---|
| 1   | APBN                 | Rp. 1.255.082.000   | Dana Desa   |
| 2   | Pendapatan Asli Desa | Rp. 82.400.000  | Pengelolaan tanah kas desa dan swadaya masyarakat |
| 3   | APBD                 | Rp. 324.440.347   | Bagi hasil pajak dan retribusi                    |
| 4   | APBD                 | Rp. 408.497.828   | Alokasi dana desa                                 |
| 5   | Industri             | Bantuan hanya ada saat kegiatan HUT RI dan Ruwah Desa berupa uang atau barang | CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )    |

Sumber : Data Olah Peneliti, 2024

Dari tabel anggaran dana desa di Pemerintah Desa Keper menunjukkan dalam pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Keper, dana desa bersumber mulai dari pendapatan asli desa (PAD), dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi (APBD).

Pemerintah Desa Keper untuk mengelola potensi desa dan mengembangkan dana desa, pemerintah membutuhkan kapasitas dan kebijakan untuk mengaktifkan semua aspek partisipasi masyarakat desa. Adapun sebagian masyarakat masih merasa tidak puas terhadap rencana pembangunan jalan desa, karena belum semua tujuan terpenuhi yang disebabkan oleh keterbatasan dana anggaran, pemerintah desa akan melanjutkan pembangunan secara bertahap [11].

Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat ditujukan kepada pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola dana desa dan menangani dukungan pemerintah dengan cara yang positif terhadap kinerja pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik meningkatkan kompetensi perangkat desa dan kemudian meningkatkan kinerja pemerintah desa [18].

Indikator partisipasi dalam pelaksanaan sesuai dengan studi sebelumnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” oleh Halimatus Sa’diyah dan Ilmi Usrotin Choiriyah sudah berjalan dengan baik yang ditunjukkan bahwa masyarakat memiliki inisiatif dalam berkontribusi berupa makanan atau minuman kepada tenaga pekerja bangunan.

Berdasarkan fenomena di atas, jika dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat menurut Kaho (2003), bahwa partisipasi masyarakat pada tahapan pelaksanaan di lapangan sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tahapan partisipasi dalam pelaksanaan sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

### Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil

Menurut Kaho (2003), partisipasi dalam pengambilan manfaat yang signifikan berkaitan dengan kualitas dari output yang dihasilkan dan kuantitas hasil dari tingkat keberhasilan yang dicapai oleh program yang dijalankan [13]. Tujuan utama dari partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan desa untuk memperbaiki, menjaga, serta memelihara hasil-hasil pembangunan desa sehingga mendorong kesukarelaan dan kesediaan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan desa akan datang [19].

Berdasarkan hasil observasi dan pernyataan dari informan peneliti yaitu salah satu Masyarakat Desa Keper menunjukkan bahwa program pembangunan fisik di Desa Keper dapat dirasakan dengan hasil yang cukup memuaskan bagi masyarakat desa, salah satunya pada peninggihan jalan dan pemasangan paving di RT 03 RW 02 karena kondisi sebelum adanya pembangunan yaitu penyesuaian ketinggian jalan tersebut dengan jalan utama setelah dibetonisasi mengakibatkan sering terjadinya banjir yang masuk ke dalam rumah warga, selain itu jalan saat musim hujan sangat becek sekali dan licin sehingga seringkali masyarakat desa terpeleset saat melewati jalan tersebut.

Partisipasi dalam tahapan pemanfaatan di desa Keper tampaknya telah dimanfaatkan dengan baik dan maksimal seperti pada pembangunan saluran irigasi yang telah dilakukan pembangunan sehingga kondisinya tampak lebih baik dan nyaman digunakan.



**Gambar 3.** Kondisi Jalan Pavingisasi dan Pembangunan Saluran Irigasi

Sumber : Data Olah Peneliti, 2024

Gambar 3 merupakan hasil setelah terealisasikan program pembangunan desa berupa peninggihan jalan dan pemasangan paving yang bertujuan agar penyesuaian ketinggian jalan lingkungan dengan jalan utama infrastruktur serta pada saat musim hujan jalan menjadi tidak becek lagi. Sementara untuk pembangunan saluran irigasi yang memadai, kegiatan pertanian dapat berjalan lebih baik sepanjang tahun termasuk pada musim kemarau sehingga masih mendapatkan pasokan air yang cukup dan membantu ketahanan pangan di Desa Keper.

Indikator partisipasi dalam pemanfaatan hasil sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” oleh Halimatus Sa’diyah dan Ilmi Usrotin Choiriyah sudah berjalan dengan baik yang dilihat dari masyarakat telah memanfaatkan fasilitas berupa infrastruktur seperti pavingisasi jalan dan saluran irigasi, yang telah dilaksanakan program pembangunan desa oleh Pemerintah Desa Keper.

Berdasarkan fenomena tersebut, jika dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat menurut Kaho (2003) dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik desa di Desa Keper dikatakan sudah berjalan dengan baik dan berhasil

sehingga masyarakat desa sudah dapat merasakan fasilitas atau infrastruktur yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa dengan kondisi yang tampak lebih baik dan nyaman saat digunakan.

### Partisipasi Dalam Evaluasi

Menurut Kaho (2003), partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi pembangunan desa berkaitan erat dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya [13]. Partisipasi dalam evaluasi bertujuan menentukan keberhasilan program yang direncanakan sebelumnya melalui identifikasi proses dan hasil yang diperoleh. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program diperlukan untuk memastikan perbaikan yang dilakukan mendapatkan masukan tentang kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan [19].

Tahapan evaluasi yaitu tahapan yang dimana adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan desa atas kekurangan yang telah terjadi pada tahapan pelaksanaan yang dibuktikan oleh laporan pertanggungjawaban berupa laporan pengawasan kegiatan maupun bukti foto kegiatan yang dilakukan per bulan, sehingga dapat melihat kendala atau permasalahan apa saja yang terjadi selama dalam proses tahapan pelaksanaan.

Dalam tahapan evaluasi, Pemerintah Desa beserta Badan Pengawasan Desa (BPD) menyelenggarakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh tim penyusunan RPJMDes untuk membahas mengenai proses dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa serta mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses tahapan pelaksanaan pembangunan desa sehingga hal ini dapat mengoptimalkan kebijakan pembangunan desa berikutnya. Faktor-faktor pembangunan desa di Desa Keper sebagai berikut :

#### a. Faktor pendukung

Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Keper, peran partisipasi masyarakat cukup aktif dalam melakukan kontribusi dan kerjasama dengan Pemerintah Desa Keper seperti memberikan bantuan secara langsung maupun dalam bentuk konsumsi ke para pekerja. Selain itu Pemerintah Desa Keper dapat mengidentifikasi program yang mana harus diprioritaskan atau program pembangunan desa yang sangat mendesak akan dilaksanakan terlebih dahulu, seperti perbaikan jalan yang berlubang, membangun penerangan di sekitar makam dan Jalan Desa Keper yang masih kekurangan cahaya lampu, perbaikan selokan, dll.

#### b. Faktor penghambat

Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Keper terdapat hambatan atau kendala yaitu keterbatasan anggaran dana desa untuk melaksanakan program pembangunan desa secara bersamaan berdampak tertundanya pelaksanaan program pembangunan desa non fisik sehingga tidak dapat terealisasi pada tahun yang direncanakan sebelumnya. Program pembangunan desa yang tertunda akan dilanjutkan pada perencanaan program pembangunan desa di tahun berikutnya.

Selain itu, faktor penghambat selanjutnya yaitu Desa Keper mendapatkan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) hanya pada acara Ruwah Desa dan HUT RI saja dan bukan di waktu yang memang benar-benar dibutuhkan. Bantuan CSR berupa barang atau uang dikelola oleh panitia kegiatan bukan melalui Pemerintah Desa Keper.

Indikator partisipasi dalam evaluasi sudah sesuai dengan studi sebelumnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang” oleh Karmita Aji, Eka Yulyana, dan Evi Priyanti yang dilihat dengan adanya kegiatan rapat evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Keper yang melakukan memonitoring jalannya pembangunan infrastruktur di Desa.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat menurut Kaho (2003), bahwa tahapan partisipasi dalam evaluasi telah terlaksana dengan baik. Sehingga pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Keper dapat berjalan dengan efektif mewujudkan tujuan program yang berkelanjutan di Pemerintah Desa Keper.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pertama, pada tahap partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah, dengan dominasi tokoh masyarakat tertentu serta minimnya keterlibatan perempuan yang aktif menyuarakan gagasan. Kedua, pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat cukup tinggi, terutama dalam pembangunan fisik desa meski perhatian terhadap pembangunan non-fisik masih terbatas karena anggaran yang lebih diprioritaskan pada infrastruktur. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil sudah optimal, di mana masyarakat dapat menikmati fasilitas infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan paving dan saluran irigasi yang memadai. Keempat, pada tahap evaluasi, meski kegiatan monitoring berjalan efektif, keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan yang tepat waktu menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.

Adapun beberapa rekomendasi dari penulis agar Pemerintah Desa Keper dapat tepat sasaran terhadap program pembangunan desa berkelanjutan di Desa Keper yaitu perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama tokoh perempuan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap tahapan pembangunan desa. Pembentukan

kelompok kerja desa yang terdiri dari perwakilan berbagai elemen masyarakat dapat membantu menjaring aspirasi yang lebih luas dan beragam. Serta, Pemerintah Desa Keper perlu mengalokasikan anggaran yang lebih seimbang antara pembangunan fisik desa dan pembangunan desa non fisik, termasuk pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan ekonomi lokal. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan hasil pembangunan dapat meningkatkan kepercayaan serta mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan dapat memungkinkan perbaikan terhadap program-program pembangunan desa berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan artikel. Kepada Aparat Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung beserta Masyarakat Desa Keper sebagai informan yang telah memberikan kesempatan dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.

## REFERENSI

- [1] R. Fitriayu Sari and A. Fajarwati, "Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman," *J. Chem. Inf. Model.*, p. Journal Bumi Indonesia-Pandowoharjo, 2016.
- [2] H. Sa'diyah and I. U. Choiriyah, "*Kabupaten Sidoarjo Community Participation in Compilation of Village Mid-Term Development Plans ( RPJM-Des ) in Kedungbanteng Village Tanggulangin District Sidoarjo Regency* Menteri Desa , Pembangunan Daerah perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP," vol. 12, no. 1, 2024.
- [3] Ali Amran, Sartika Yuliana, Agus Nurofik, and Fadhlan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto," *J. Cakrawala Ilm.*, vol. 2, no. 10, pp. 3619–3638, 2023, doi: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5827.
- [4] Maripah, "Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar," vol. 4, no. 2, p. 282993, 2017.
- [5] Amiruddin, Usuluddin, and Ansari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) di Kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah," vol. 9, no. 18, pp. 40–46, 2020.
- [6] F. R. Pramudy, P. Marsingga, and H. Purnamasari, "Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu," *J. Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 6, no. 4, pp. 2129–2133, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i4.3602/http.
- [7] M. N. Firmansyah, Arif Budiman, Adilansyah, Muhamadong, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa," vol. 7, no. 1, pp. 668–674, 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4502/http.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. cv. alfabeta., 2016.
- [9] Soelaiman Holil., *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial., 1980.
- [10] I. K. . Suarjaya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangeh Kecamatan Abianseml Kabupaten Badung," *Widyanata*, vol. 18, no. 1, pp. 30–37, 2021, doi: 10.54836/widyanata.v18i1.602.
- [11] N. Sari, H. E. Parawu, and A. Taufik, "Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan," vol. 10, 2024.
- [12] Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan*. pt. raja grapindo persada, 2003.
- [13] K. Aji, E. Yulyana, and E. Priyanti, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang," *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 7, no. 3, pp. 17–22, 2022, doi: 10.36982/jpg.v7i3.2300.
- [14] M. Hamdan, E. Suwarlan, and A. Budiawan, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2021," vol. 02, no. 02, pp. 3668–3677, 2022, [Online]. Available: [http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/2284/66\\_HamdanMaosul\\_3668-3677.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/2284/66_HamdanMaosul_3668-3677.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [15] R. Y. Aromadita and E. Pranoto, "*Community Participation in Village Development*," *Int. J. Res. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 05, no. 06, pp. 124–145, 2024, doi: 10.47505/ijrss.2024.6.10.

- [16] F. Widiatmoko, E. B. Orbawati, and Y. Kurniasih, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo," *PESIRAH J. Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 90–97, 2023, doi: 10.47753/pjap.v3i2.49.
- [17] H. Sa'diyah, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo," *Inov. Pembang. J. Kelitbangan*, vol. 12, no. 01, pp. 39–56, 2024, doi: 10.35450/jip.v12i01.433.
- [18] E. Handayani, A. Garad, A. Suyadi, and N. Tubastuvi, "Increasing The Performance of Village Services With Good Governance and Participation," *World Dev. Sustain.*, vol. 3, no. July 2022, p. 100089, 2023, doi: 10.1016/j.wds.2023.100089.
- [19] M. Rizki Maulana *et al.*, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan RKP Desa (Studi Kasus Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Pembang.*, vol. 7, no. 7, pp. 2549–8363, 2022.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*